



**RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Drs. Warsito No. 76, Teluk Betung Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2023 sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Rencana Kerja ini berisi perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang diharapkan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2019 - 2024. Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Ir. LIZA DERNI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19680812 199903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Dokumen RENJA	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan	7
Capaian Renja Terhadap Renstra.....	30
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan.....	31
2.3 Isu – isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan	35
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	42
3.3 Rumusan Program dan Kegiatan	44
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023	51
BAB V. PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses yang melibatkan unit perencana dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; disebutkan bahwa masing-masing Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Mengacu pada pasal 129, Permendagri 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa perumusan rancangan awal RENJA Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a. Pendahuluan; b. hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu; c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan e. Penutup.

Perencanaan menentukan kebijakan, program dan kegiatan melalui tahapan- tahapan yang merupakan siklus tahunan agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam rangka menjembatani dan memfasilitasi pembangunan Kelautan dan Perikanan di daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung perlu menyusun Rencana Kerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan pergub lampung nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Pergub Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas, yaitu :

1. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan *eradikasi* penyakit ikan di darat;
4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi;
8. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
9. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
10. Pelayanan administratif; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

(Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 59 Tahun 2021, Tanggal: 31 Desember 2021)

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Pengelolaan Ruang Laut, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Perikanan Budidaya Dan Penguatan Daya Saing terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari :
 - 1) UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pengujian dan Monitoring;
 - c) Seksi Pengembangan Hasil Perikanan;
 - 2) UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau
 - a) Sub Bagian Usaha;
 - b) Seksi Pelayanan dan Pengendalian Mutu Perbenihan;
 - c) Seksi Sarana dan Produksi.
 - 3) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Seksi Pengusahaan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana
 - 4) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Maringgai;

- c) Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Teladas.
- 5) UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung :
- a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Seksi Pengusahaan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana.
- 8). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2023 adalah :

1. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, masyarakat, serta dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
2. Sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan dalam 1 (satu) tahun kedepan;
3. Sebagai dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan lembaga pemerintah lain, khususnya bagi lembaga non-pemerintah;
4. Sumber informasi bagi para pelaku kegiatan dalam internal Dinas Kelautan dan Perikanan, serta *stakeholders*, baik di pusat maupun daerah, tentang kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Mempercepat proses dan kualitas pencapaian hasil yang telah direncanakan;
3. Panduan prioritas kegiatan-kegiatan organisasi yang berorientasi kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renja Terhadap Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.3. Isu-isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- 3.3. Rumusan Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DKP TAHUN 2023

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021 dan Capaian Renja Terhadap Renstra

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dilakukan secara periodik melalui evaluasi renja yang dilakukan setiap triwulan. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 tergambar dalam capaian renja pada Triwulan ke IV tahun 2021 sebagaimana Tabel berikut:

**LAPORAN REALIASASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TA 2021
TRIWULAN IV 2021**

STATUS: s.d TRIWULAN IV 2021

**Dinas Kelautan dan
Perikanan**

3.252.166.666.666.660

No	Kode Permen dagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(out come) / Kegiatan(Ou tcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5			
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL																	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi																	

1	3.25.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan aturan pelaksanaannya yang diterbitkan (dokumen)	2	212.144.000,00	0	0	2	192.694.000,00	2	192.678.000,00	100	99,9	2	192.678.000,00	100	90,82	
2	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	231.467,00	88.124.000,00	0	0	231.467,00	71.424.000,00	231.467,00	56.581.900,00	100	79,2	231.467,00	56.581.900,00	100	64,21	

3	3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kawasan konservasi yang dikelola (2 lokasi)	1	580.000.000,00	0	0	1	580.000.000,00	1	758.940.000,00	100	130,85	1	758.940.000,00	100	130,85	
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi																		
4	3.25.02.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah pemanfaatan/perizinan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai peraturan (dokumen)	1	38.384.000,00	0	0	1	35.884.000,00	1	35.808.516,00	100	99,79	1	35.808.516,00	100	93,29	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil																		
5	3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang	4	220.200.000,00	0	0	4	220.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Pulau Kecil	terkelola dengan baik (lokasi)															
6	3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan	5	158.464.000,00	0	0	5	142.617.600,00	5	142.406.100,00	100	99,85	5	142.406.100,00	100	89,87	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																		
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil																		
7	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah bantuan yang diserahkan ke masyarakat	3.660,00	798.848.000,00	0	0	1.200,00	388.348.000,00	1.286,00	353.974.000,00	100	91,15	1.286,00	353.974.000,00	35,14	44,31	

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																	
8	3.25.03.1.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data SDI yang tersedia (dokumen).	15	453.642.000,00	0	0	15	376.092.500,00	15	372.586.000,00	10	99,07	15	372.586.000,00	100	82,13
9	3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan/ kelompok yang meningkat kompetensinya/ mendapat asuransi (orang)	1.000,00	315.199.000,00	0	0	1.000,00	315.199.000,00	1.000,00	313.699.000,00	10	99,52	1.000,00	313.699.000,00	100	99,52
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT																	
10	3.25.03.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk	Jumlah Dokumen Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap	1	44.485.000,00	0	0	1	44.485.000,00	1	31.485.000,00	10	70,78	1	31.485.000,00	100	70,78

		Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																
11	3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah nelayan yang dibina/dilayani dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap (lokasi)	1.000,00	7.395.000,00	0	0	1.000,00	7.395.000,00	350	9.696,00	35	131,12	350	9.696,00	35	131,12	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi																
12	3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan dan TPI yang dibina (Pelabuhan)	9	60.281.000,00	0	0	9	60.281.000,00	9	54.218,00	10	89,94	9	54.218,00	100	89,94	

13	3.25.03. 1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan yang ditata/ dibangun sarananya (pelabuhan)	2	4.809.570.000,0 0	0	0	2	4.885.686.595 ,00	2	4.75 1.36 7.00 0,00	10 0	97,2 5	2	4.7 51. 367 .00 0,0 0	100	98,79	
14	3.25.03. 1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I yang dikelola (UPTD)	4	2.176.480.000,0 0	0	0	4	1.802.140.000 ,00	4	1.74 2.40 4.33 8,00	10 0	96,6 9	4	1.7 42. 404 .33 8,0 0	100	80,06	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																		
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
15	3.25.04. 1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidayaan ikan yang dibina (kelompok)	30	10.000.000,00	0	0	30	10.000.000,00	30	10.0 00.0 00,0 0	10 0	100	30	10. 000 .00 0,0 0	100	100	

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut																		
16	3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut/Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang disediakan (dokumen)	1	300.000.000,00	0	0	1	350.000.000,00	1	347.984.000,00	100	99,42	1	347.984.000,00	100	115,99	
17	3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan (paket)	4	783.500.000,00	0	0	4	783.500.000,00	4	778.624.000,00	100	99,38	4	778.624.000,00	100	99,38	
18	3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan (paket)	3	940.000.000,00	0	0	3	940.000.000,00	3	897.597.350,00	100	95,49	3	897.597.350,00	100	95,49	

		Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah																
19	3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah UPTD Balai Benih Ikan yang dibiayai operasionalnya (UPTD)	1	2.091.705.000,00	0	0	1	2.110.805.000,00	1	2.013.865.546,00	100	95,41	1	2.013.865.546,00	100	96,28	

20	3.25.04. 1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan (unit)	1	4.843.835.000,00	0	0	1	5.109.835.000,00	1	4.832.748,249,00	100	94,58	1	4.832.748,249,00	100	99,77		
21	3.25.04. 1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di	Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan	15	43.388.000,00	0	0	15	43.388.000,00	15	37.813,000,00	100	87,15	15	37.813,000,00	100	87,15		

		Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	(kegiatan)															
22	3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembudidayaan ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya (pembudidaya)	30	50.000.000,00	0	0	30	30.769.000,00	30	30.081.00,00	100	97,53	30	30.008.100,00	100	60,02	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil																		
23	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum	100	60.750.000,00	0	0	100	60.750.000,00	100	60.750.00,00	100	100	100	60.750.00,00	100	100	

		sampai dengan 12 Mil	bidang kelautan dan perikanan (%)															
24	3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Operasional Kapal Pengawasan mendukung patroli laut (unit)	2	811.360.000,00	0	0	2	311.360.000,00	2	306.356.555,00	100	98,39	2	306.356.555,00	100	37,76	
25	3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang dibangun (pokmaswas)	21	199.827.000,00	0	0	21	199.827.000,00	21	199.822.000,00	100	100	21	199.822.000,00	100	100	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																

26	3.25.05. 1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Kab/kota yang di pantau/ diawasi (kab/kota)	7	21.840.000,00	0	0	7	21.840.000,00	7	21.840,00	100	100	7	21.840,00	100	100	
----	---------------------	--	--	---	---------------	---	---	---	---------------	---	-----------	-----	-----	---	-----------	-----	-----	--

27	3.25.05. 1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai d	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	60	27.572.000,00	0	0	60	27.572.000,00	60	27.572.000,00	100	60	27.572.000,00	100	100	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN															
		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi															

28	3.25.06.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan (dokumen)	10	62.500.000,00	0	0	10	62.500.000,00	10	60.504.000,00	10	96,81	10	60.504.000,00	100	96,81	
29	3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/	Jumlah dokumen potensi investasi/ promosi yang disusun (dokumen)	2	200.000.000,00	0	0	2	166.800.000,00	2	163.886.750,00	10	98,25	2	163.886.750,00	100	81,94	

		Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																
30	3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah pengolahan dan pemasar yang difasilitasi/meningkat kompetensinya (orang)	30	150.000.000,00	0	0	30	150.000.000,00	30	140.676.000,00	100	93,78	30	140.676.000,00	100	93,78	

31	3.25.06. 1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah produk, TPI, pasar, kualitas air, pakan ikan, residu antibiotik yang terpantau	330	309.698.100,00	0	0	330	504.648.100,00	330	503.210.850,00	100	99,72	330	503.210.850,00	100	162,48	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																

32	3.25.06. 1.03.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan /Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan / distribusi Ikan yang dilaksanakan	15	250.000.000,00	0	0	15	188.552.000,00	15	185.360.065,00	10	0	98,31	15	185.360.065,00	100	74,14	
33	3.25.06. 1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan (paket)	10	785.480.000,00	0	0	10	565.774.000,00	11	557.871.200,00	11	0	98,6	11	557.871.200,00	110	71,02	

34	3.25.06. 1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen data dan Sistem Informasi Manajemen Logistik Lintas (dokumen)	1	100.000.000,00	0	0	1	83.957.000,00	1	66.160,00,00	100	78,8	1	66.160,00,00	100	66,16	
Rata-Rata capaian kinerja %											95,65	94,61			93,53	88,35		
Predikat kinerja											sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	tinggi		

Monitoring Faktor

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	- Kualitas dan kuantitas SDM yang berkompeten - Koordinasi DKP Provinsi dengan Pemerintah Pusat, DKP Kabupaten/ Kota, Masyarakat, dan Stakeholder terkait sudah baik sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan - Kolaborasi kegiatan dengan stakeholder terkait termasuk NGO/ Yayasan
Faktor penghambat pencapaian kinerja	- Keterbatasan Jumlah SDM terutama karena Mutasi PNS di lingkungan DKP dan pembagian jabatan fungsional yang kurang sesuai kebutuhan, bahkan DKP tidak mendapat formasi CPNS di tahun 2021. - Beberapa kegiatan fisik baru mulai dilaksanakan pada Triwulan ke IV sehingga memerlukan upaya monitoring lebih ketat dalam pelaksanaan dan administrasi keuangan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	- Memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik realisasi fisik maupun administrasi keuangan. - Melengkapi dokumen-dokumen administrasi dan pelaporan sesuai aturan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	- Penajaman pada Program dan Kegiatan dan penentuan skala prioritas untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran - Memperbaiki indikator output beberapa sub kegiatan sesuai dengan permendagri dan uraian kegiatan.

Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Secara umum, realisasi masing-masing program yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan cukup baik, dapat dilihat dari realisasi keuangan rata-rata yang diatas 90%. Kegiatan secara umum dapat terealisasi dengan baik dan mendukung pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan di Renstra DKP 2019 – 2024.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.433.999.846	17.781.346.296	96,45	652.653.551
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.242.819.600	1.186.414.516	95,46	56.405.084
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.879.627.095	7.622.314.729	96,73	257.312.366
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.378.297.000	8.948.640.246	95,41	429.656.754
5.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	621.349.000	616.340.555	99,19	5.008.445
6.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.722.231.100	1.677.668.865	97,41	44.562.235

Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2021

Program dan kegiatan yang sudah ditetapkan masing-masing mendukung capaian indikator kinerja yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra DKP 2019 – 2024.

Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator sasaran	Target Capaian Indikator Sasaran 2021	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan				
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	100 (398.551 ton)	90,2 (359.480,33 Ton)
		Produksi Perikanan Tangkap	151.869,90 Ton	177.221,79 Ton
		Produksi Perikanan Budidaya	161.588,70 Ton	182.259,54 Ton
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	100 (21.845 ton)	84,67% (18.495 ton)
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama				
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	80	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2024), yaitu : **“Rakyat Lampung Berjaya”**. Sedangkan Misi pembangunannya adalah :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Selain itu dalam Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu **Program Nelayan Berjaya**, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan:

- a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
- b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan
- c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia
- d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi
- e. SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra pertambakan.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan UPTD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan

secara khusus akan mendukung pencapaian **Misi ke 5 Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian dan Wilayah Perdesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan** serta **Misi ke 6 Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama.**

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-5, dilakukan melalui Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan melalui program subsidi, fasilitasi pemasaran dan peningkatan mutu, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana serta membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha. Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diprioritaskan untuk mendukung Misi ke 5 tersebut yaitu:

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan
4. Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-6, dilakukan melalui Pengarustamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan, dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) khususnya Tujuan ke 14, Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan alokasi ruang laut yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup serta didukung pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Untuk melaksanakan Misi ke 6 tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program:

- a. Program Pengelolaan Ruang Laut
- b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2.3. Isu-isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sektor kelautan dan perikanan dalam kawasan regional telah berkembang pesat kendati memiliki peluang dan tantangan. Apalagi hal ini dibarengi dengan tingginya permintaan yang terus tumbuh secara cepat untuk komoditi perikanan dikarenakan lonjakan pertumbuhan penduduk. Sektor perikanan dapat memainkan peran penting dalam memenuhi tuntutan baru. Terlebih Provinsi Lampung dan kawasan lautnya termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yaitu alur keluar masuknya kapal- kapal baik dari dalam maupun keluar negeri melalui Selat Sunda. Namun disisi lain, sektor ini juga mengalami tantangan antara lain :

1. Pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,
2. Rencana kerja untuk memperkuat pengembangan dan pengelolaan perikanan,
3. Pemberantasan *Illegal-Unreported-Unregulated (IUU) fishing*,
4. Penguatan ketahanan pangan melalui intervensi perikanan,
5. Mempromosikan produksi pangan yang berkelanjutan melalui teknologi perikanan yang berkelanjutan dan
6. Dampak perubahan iklim terhadap perikanan dan akuakultur.

Tantangan diatas diimbangi dengan peluang yang ada :

1. Adanya landasan hukum yang kuat terkait pembangunan kelautan perikanan, antarlain :
 - a. UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan;
 - c. UU No 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Provinsi Lampung memiliki wilayah perairan dan potensi perikanan darat dan laut yang masih belum termanfaatkan secara optimal;
3. Provinsi Lampung dalam membangun daerahnya menuju masyarakat yang maju dan sejahtera akan sangat mengandalkan pembangunan berbasis kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta

mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*).

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan berdampak pada meningkatnya pola konsumsi ikan masyarakat.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan.

Berdasarkan hasil penyerapan usulan dari pemangku kepentingan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, beberapa usulan/ isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan usulan program dan kegiatan tahun 2020 antara lain:

1. Revitalisasi tambak ex Dipasena dan rencana pengembangan Provinsi Lampung menjadi lumbung udang nasional. Pemerintah pusat melalui kementerian dan BUMN terkait mulai mengalokasikan kegiatan dan anggaran untuk mendukung revitalisasi. Oleh karena itu, Provinsi Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga perlu memfasilitasi melalui alokasi kegiatan dan anggaran baik yang bersifat percepatan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi maupun bantuan langsung.
2. Permasalahan sampah diwilayah pesisir mendapat perhatian khusus dari Bapeda agar ditindaklanjuti oleh OPD terkait, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan. Permasalahan sampah yang terakumulasi di wilayah perairan Provinsi Lampung khususnya Teluk Lampung, harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan karena wilayah perairan sejatinya mendapat imbas dari kegiatan-kegiatan yang ada diwilayah daratan.
3. Permasalahan stunting di Provinsi Lampung juga perlu mendapat perhatian dari Dinas Kelautan dan Perikanan karena beberapa lokasi/ desa yang terindikasi stunting masuk dalam desa pesisir/ desa perikanan. DKP juga diharapkan melakukan intervensi melalui peningkatan konsumsi ikan/ kampanye Gerakan Gemar Makan Ikan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dimulai sejak tahun 2012. Melalui industrialisasi kelautan dan perikanan, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Renstra KKP	Renstra Dinas
<p>Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi Nasional; • Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan; • Meningkatkan pendapatan. 	<p>Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi perikanan budidaya; • Optimalnya produksi perikanan tangkap • Meningkatnya kualitas kelompok masyarakat pesisir; • Meningkatnya kawasan budidaya laut, air payau dan tawar; • Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang maju dan sejahtera.

<p>Berkembangnya diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan; • Meningkatkan branding produk perikanan dan <i>market share</i> dipasar luar negeri; • Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. 	<p>Mewujudkan diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat
<p>Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan; 	<p>Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan yang ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat; • Kelompok masyarakat pengawas
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil; • Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparat pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • perikanan meningkat; • Berkurangnya tingkat pelanggaran.

Penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan kelautan meliputi industri

kelautan seperti perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Posisi Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung

Deskripsi mengenai posisi sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung dibahas dengan mempertimbangkan penetapan Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bisnis inti Provinsi Lampung, tujuan pembangunan dan pengembangan Kelautan dan Perikanan Lampung dan peraturan perundangan yang mendukung pengembangan ke Kelautan dan Perikanan Lampung. Dalam hal ini penetapan Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bisnis inti merupakan hal utama untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Kelautan dan Perikanan Lampung yang didukung dengan segenap peraturan yang ada.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi-misi, renstra SKPD yang lalu, RTRW dan lain-lain, maka dapat dihimpun isu strategis kelautan perikanan tersebut menjadi komponen SWOT yang secara sistematis dikelompokkan dalam komponen kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut :

Kekuatan (STRENGTH)	Kelemahan (WEAKNESS)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi sumberdaya kelautandan perikanan yang besar dan posisi geografis yang strategis 2. Dukungan regulasi kelautan dan perikanan yang ada, al: Perda RZWP3K, Perda Perlindungan Nelayan 3. Masuk dalam prioritas 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024 4. Hasil dan produk kelautan perikanan yang sudah ada 5. Dukungan anggaran yang sudah ada (APBN dan APBD) 6. Keberadaan 3 UPT Pusat untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung 7. Terbentuknya kelembagaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha 3. Lemahnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar 4. Lemahnya aplikasi teknologi budidaya terkini, efisiensi pakan dan penerapan standar CBIB 5. Rendahnya mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap 6. Pengurusan dokumen perikanan kapal masih tergantung pada intitusi lain (KSOP) 7. Lemahnya pemanfaatan bioteknologi/potensi kelautan non konsumsi
Peluang (OPORTUNITY)	Ancaman (THREAT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya sistem teknologi informasi dan industri 4.0 2. Meningkatnya permintaan produk hasil perikanan 3. Akses pasar bebas masyarakat ekonomi Asean 4. Berkembangnya permintaan produk non konsumsi dan ekspor ikan hias 5. Pengembangan kawasan konservasi dan pemberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan budidaya dan industri pengolahan negara-negara Asean 2. Dampak perang dagang US – China dan perlambatan ekonomi global 3. Serangan penyakit dan penurunan daya dukung lingkungan 4. Perubahan iklim 5. IUU Fishing 6. Pencemaran dan sampah pesisir 7. Adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut

<p>ekonomi masyarakat pesisir</p> <p>6. Perubahan regulasi di level pusat</p> <p>7. Pengembangan budidaya lobster dan komoditas ekonomis bernilai tinggi lainnya</p>	
--	--

Berdasarkan analisis SWOT dari isu-isu strategis tersebut di atas maka terdapat beberapa strategi yang menjadi arah kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan kurun waktu 2019 -2024 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

Arah Kebijakan:

1. Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan
2. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi

2.Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan

Arah Kebijakan:

1. Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan
2. Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan berkeadilan

3.Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk perikanan
2. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut diatas, program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Renstra 2019 -2024 juga memperlihatkan pengarusutamaan dari:

1.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : Implementasi SDGs

(Goal 14), meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan yang dikelola.

2. Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (PPRB); Penyelarasan Renja tahunan dengan Pergub No.164 thn 2018 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung

3. Stunting; Prioritas daerah rawan stunting untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi anak sekolah dan ibu hamil, meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat

4. Penanggulangan kemiskinan; Penyelarasan lokasi dan sasaran kegiatan/ bantuan pada rumah tangga miskin yang berpotensi

5. Gender; Meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Mengacu kepada Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan
- 2) Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut

Lebih lanjut pencapaian tujuan tersebut dapat diukur dengan memonitor perkembangan indikator kinerja perangkat daerah yang ditargetkan pada akhir periode ini di tahun 2023.

Tabel. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	2023
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	100
2.	Meningkatnya Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Prosentase Pencapaian Ekspor Perikanan	100
3.	Meningkatny Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Alokasi Ruang Laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase Pelaku Usaha KP yang Patuh Kepada Alokasi	95

Sasaran Strategis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurunwaktu 5 (lima) tahun dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Daerah

- 1.1 Meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya
 - a. Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan dengan arah kebijakan: Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan; dan Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan berkeadilan
- 1.2 Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan
 - a. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya dengan arah kebijakan: Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk perikanan; Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan

Tujuan: Terwujudnya Pembangunan yang Berkelanjutan

1. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan arah kebijakan: Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan ; dan Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi

3.3 Rumusan Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi dan Kebijakan tersebut di atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah menjabarkan dalam bentuk Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan Program ini meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta tercapainya administrasi keuangan yang sistematis dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan dan sub kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan wilayah perairan 0-12 mil ke provinsi, sesuai dengan UU 23 tahun 2014, maka pengelolaan ruang laut khususnya wilayah perairan 0-12 mil sepenuhnya menjadi kewenangan Provinsi. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi OPD untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan didalamnya. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pengelolaan ruang laut sebagai berikut:

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
 - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program Pengembangan Perikanan Tangkap adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap (volume dan nilai), peningkatan pendapatan nelayan, dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan dan sub kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas

- kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10GT sampai dengan 30GT
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30GT
 4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
 - Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
 5. Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai dengan 30 GT
 - Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Tujuan program Pengembangan Budidaya Perikanan adalah meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perikanan budidaya (keamanan pangan). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, beberapa kegiatan dan sub kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut

- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/kota
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/kota
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/kota
 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/kota

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Selain pengelolaan wilayah perairan 0-12 mil, sesuai dengan UU 23 tahun 2014, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dilimpahkan sepenuhnya kepada provinsi. Hal ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab dan tantangan besar bagi provinsi mengingat keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana pengawasan yang dimiliki bila harus mengawasi seluruh wilayah yang menjadi kewenangan provinsi. Oleh karena itu, strategi pengawasan terpadu dan terintegrasi dengan stakeholder terkait menjadi prioritas, didukung dengan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas dan patroli bersama.

Rincian kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil
 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten./kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya.
 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten./kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya.
 - Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tujuan program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah mewujudkan produk perikanan bermutu yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, dengan sasaran peningkatan nilai ekspor hasil perikanan, peningkatan volume produk olahan, peningkatan rata-rata konsumsi ikan nasional, peningkatan nilai produk non konsumsi pada tingkat pedagang besar, dan peningkatan nilai investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan berperan aktif dalam mengurangi permasalahan stunting dan pemenuhan gizi sumber protein masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan dan sub kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka menghasilkan Produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing
3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/distribusi ikan Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

BAB IV.
RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022

Agenda dan Prioritas

1. Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur infrastruktur yang mendukung kegiatan kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan produksi perikanan.
3. Percepatan penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat, mutu dan keamanan produk hasil perikanan.

Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

- 1 Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
- 2 Akselerasi pembangunan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
- 3 Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
- 4 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- 5 Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
- 6 Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- 7 Mengembangkan Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM; dan terakhir
- 8 Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI LAMPUNG**

PD: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023		CATATAN PENTING			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan									
03:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		100%		20.669.261.484			100%	21.203.999.484
3.25.01.1. 01	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan		100%		150.000.000				225.000.000

3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Rencana aksi, Rencana Kinerja tahunan, Identifikasi resiko program/ kegiatan (SPIP))	Musrenbang Kelautan dan Perikanan	5 dokumen	Bandar Lampung	65.000.000	APBD		5 dokumen	75.000.000
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	Rakor Lingkup Kelautan dan Perikanan	3 Kegiatan	Provinsi Lampung	60.000.000	APBD		3 Kegiatan	75.000.000
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja (Laporan Kinerja, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, PK, dan LPPD/LKPJ)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	Provinsi Lampung	25.000.000	APBD		6 dokumen	75.000.000
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan		1 dokumen	1 dokumen	15.063.999.484			1 dokumen	15.143.999.484
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	Bandar Lampung	15.018.999.484	APBD	Penata an belanja	1 tahun	15.018.999.484
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi	1 dokumen	Bandar Lampung	25.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000

		Asset	Keuangan SKPD							
3.25.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran PD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 dokumen	Bandar Lampung	20.000.000	APBD		1 dokumen	75.000.000
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan BMN		1 dokumen	1 dokumen	30.000.000			1 dokumen	40.000.000
3.25.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Barang Milik Daerah pada SKPD		3 dokumen	Bandar Lampung	20.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000
3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 dokumen	Bandar Lampung	10.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (orang)		100%	100%	115.500.000			100%	120.000.000
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi (orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 orang	Bandar Lampung	45.000.000	APBD		6 orang	50.000.000
3.25.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan serta	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	6 kali	Bandar Lampung	30.000.000	APBD		5 kali	30.000.000

		pembinaan budaya kerja (kali)								
3.25.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 kali	Bandar Lampung	40.500.000	APBD		4 kali	40.000.000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		100%		1.346.859.000			100%	2.650.000.000
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Waktu Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Bandar Lampung	25.000.000	APBD		1 Tahun	25.000.000
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Bandar Lampung	50.000.000	APBD		1 Tahun	40.000.000
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Bandar Lampung	10.000.000	APBD	Penata an belanja	1 Tahun	20.000.000
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah UPTD yang disediakan operasionalnya	Operasional UPTD dan LS Pro HP	1 UPTD	UPTD LPPHP, Bandar Lampung	176.399.000	APBD	Penata an belanja	1 UPTD	400.000.000
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Bandar Lampung	20.000.000	APBD		1 Tahun	20.000.000

3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan publikasi dalam media cetak	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Bandar Lampung	25.000.000	APBD		1 Tahun	25.000.000
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah waktu pengadaan ATK, bahan kebersihan dan pameran yang disediakan	Penyediaan Bahan/ Material	1 Tahun	Bandar Lampung	80.000.000	APBD		1 Tahun	80.000.000
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Penyediaan Layanan Makan dan Minum	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	Bandar Lampung	40.000.000	APBD		1 Tahun	40.000.000
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu penyediaan perjalanan dinas koordinasi, konsultasi, pembinaan dan monev lingkup OPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Provinsi Lampung dan Luar Provinsi	920.460.000	APBD	Penata an belanja	1 Tahun	2.000.000.000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 tahun		226.007.000			1 tahun	300.000.000
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin kantor (unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	Bandar Lampung	149.858.200	APBD		10 unit	150.000.000

3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	Bandar Lampung	76.148.800	APBD		10 unit	150.000.000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 tahun		2.861.374.000			1 tahun	2.075.000.000
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	Bandar Lampung	556.733.500	APBD	Penata an belanja	1 tahun	475.000.000
3.25.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Layanan perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	Bandar Lampung	50.000.000	APBD		1 tahun	50.000.000
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Layanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	Bandar Lampung	2.254.640.500	APBD	Penata an belanja	1 tahun	1.550.000.000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 tahun		875.522.000			1 tahun	650.000.000

3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Pajak dan Perizinan, Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	Bandar Lampung	426.967.000	APBD	Penata an belanja	1 tahun	350.000.000
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Layanan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	Bandar Lampung	398.660.000	APBD		1 tahun	200.000.000
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Layanan Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	Bandar Lampung	49.895.000	APBD		1 tahun	100.000.000
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)		85		1.025.000.000			85	1.400.000.000

3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		3 kegiatan					3 kegiatan	
3.25.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan aturan pelaksanaannya yang diterbitkan (dokumen)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Koordinasi integrasi RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Lampung.	2 dokumen	Bandar Lampung, Pesisir Barat	200.000.000	APBD		2 dokumen	300.000.000
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa, Pembinaan Kawasan Konservasi Daerah Sosialisasi Penanganan Mamalia Terdampar Pemasangan Papan himbauan dan bantuan honorarium pengelola	231.467	Pesisir Barat dan Tanggamus	313.000.000	APBD / DAK Konservasi		231.467	100.000.000

			KKLD							
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau dan/atau kawasan konservasi yang direhabilitasi	DAK (Pembangunan Gedung Kantor dan Gapura KKLD Ngambur)	2 lokasi	Pesisir Provinsi Lampung	22.000.000	APBD		1 lokasi	300.000.000
3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilakukan	Pendataan Tutupan terumbu karang di Perairan Provinsi Lampung	2 kegiatan		215.000.000	APBD		2 kegiatan	200.000.000
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		1 kegiatan					1 kegiatan	

3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (dokumen)	Verifikasi Lapangan KKPRL Pendataan Kegiatan Eksisting Pemanfaatan Ruang Laut	10	Bandar Lampung	75.000.000	APBD	Penata an belanj a	10	100.000.000
3.25.02.1.03	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		2 kegiatan					2 kegiatan	
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik (lokasi)	Kegiatan Bulan Cinta Laut Operasional Kapal Teluk Lampung	4 lokasi	PPP Lempasing, Bandar Lampung dan Tulang Bawang	180.000.000	APBD		4 lokasi	200.000.000
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan	DAK (Pengembangan Usaha Garam)	5 kali	7 Kab/Kota Pesisir Provinsi Lampung	20.000.000	APBD / DAK GARAM		5 kali	200.000.000
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)		193.509,84		15.056.928.200			193.509,84	5.560.000.000
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan								

	Dengan 12 Mil	Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana nelayan yang disediakan	Bantuan alat tangkap ramah lingkungan (bubu 900 unit dan jaring gillnet 200 piece), Perdin identifikasi dan penyerahan bantuan.	100 unit	100 unit	400.000.000	APBD	Sarpras Alat Tangkap	100 unit	750.000.000
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan/kelompok yang meningkat kompetensinya/mendapat asuransi (orang)	Bantuan Jaminan Sosial bagi Nelayan Kecil (1.150 nelayan), Perdin sosialisasi dan verifikasi.	1150 orang		350.000.000	APBD	Asuransi Nelayan	1500 orang	400.000.000
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan mendukung Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan								

3.25.03.1.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data SDI yang tersedia (dokumen).	Kegiatan validasi dan pendampingan statistik perikanan tangkap.	1 dokumen	14 Kab/Kota	100.000.000	APBD		1 dokumen	400.000.000
3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha penangkapan / benih SDI yang disediakan	Restocking Perairan Umum Daratan (100.000 ekor Jelabat, 120.000 ekor Patin, 400.000 ekor Nila), Kegiatan identifikasi dan Penebaran di 4 lokasi.	1.050.000 ekor	14 Kab/Kota	400.000.000	APBD	Restocking	1500 orang	400.000.000
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kegiatan mendukung Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT		2 kegiatan					2 kegiatan	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di	Jumlah nelayan yang dibina/dilayani dalam rangka penerbitan izin	Pelaksanaan Gerai Perizinan di 2 lokasi (1 kali)	1000 Nelayan	Provinsi Lampung	115.948.200	APBD	Penata an belanja	1000 Nelayan	30.000.000

	Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	usaha perikanan tangkap (lokasi)								
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		4 pelabuhan					4 pelabuhan	
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan dan TPI yang dibangun (Pelabuhan)	Perdin Pembinaan (146 jt)	9 pelabuhan	7 Kab/Kota Pesisir Provinsi Lampung	150.000.000	APBD		9 pelabuhan	100.000.000
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan yang ditata/ dibangun sarannya (pelabuhan)	DAK	2 lokasi	PPP Lempasing, Bandar Lampung dan PPP Kota Agung, Tanggamus	12.062.000.000	DAK		2 lokasi	1.000.000.000
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I yang dikelola (UPTD)	Operasional Pelabuhan,	1 PPP	PPP Lempasing, Bandar Lampung	1.428.980.000	APBD	Penataan belanja	1 PPP	2.400.000.000
		Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II yang dikelola (UPTD)	Pelayanan Pelabuhan di PP Labuhan Maringgai, PP Teladas dan PP Kuala Penet	2 PPP	PPP Labuhan Maringgai, Lampung Timur dan PPP Teladas,				2 PPP	

					Tulang Bawang					
		Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III yang dikelola (UPTD)	Operasional Pelabuhan, Pengadaan meubeleur gedung syahbandar.	1 PPP	PPP Kota Agung, Tanggamus				1 PPP	
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT									
3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pendataan dan pendaftaran	100 Nelayan	Provinsi Lampung	50.000.000	APBD		120 Nelayan	80.000.000
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		205.040,53		3.632.858.000			205.040,53	4.425.000.000
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah			10 dokumen						

	Provinsi									
3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah pelaku usaha budidaya ikan yang diterbitkan rekomendasin izinnya / dilakukan pembinaan (kelompok)	Sosialisasi KPB	30	Provinsi Lampung	150.000.000	APBD		30	75.000.000
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut									
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut/Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan (dokumen)	Validasi data statistik perikanan budidaya	1	Provinsi Lampung	320.000.000	APBD	Penata an belanj a	1	200.000.000
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan (paket)	Bantuan KJA Lobster (4 unit)	4	Pesawaran dan Lampung Selatan	120.000.000	APBD	Penata an belanj a	4	750.000.000

3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan (paket)	Operasional BPBALP di Kota Agung dan Lanjutan pembangunan	3	Kota Agung	842.164.000	APBD	BBALP	3	2.000.000.000
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan (unit)	Bantuan Pakan Ikan kerjasama Unila (23.000 kg) Bantuan Budikdamber (530 paket)	1	Provinsi Lampung	450.000.000	APBD	Bantuan Budidaya	1	1.000.000.000
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan (kegiatan)	Sosialisasi Obat Ikan dan Pakan (5 lokasi) Pelatihan Budidaya (1 kali)	15	Provinsi Lampung	200.000.000	APBD		15	100.000.000
3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkat	Perdin monitoring, pembinaan dan	30	Bandar Lampung	80.000.000	APBD		30	100.000.000

	Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	kompetensinya (pembudidaya)	pemantauan pembudidaya ikan (CBIB)							
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat									
3.25.04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Calon Induk/Pakan Alami/Tandon (DAK)	1	BBIS Purbolinggo, Lampung Timur, Provinsi Lampung	700.000.000	DAK		1	800.000.000
3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau	Operasional BBIS Purbolinggo, Pakan Induk dan Benih Penyediaan sarpras (Bak Fiber) Bantuan Benih dan Pakan	4	BBIS Purbolinggo, Lampung Timur, Provinsi Lampung	770.694.000	APBD	Opr. BBIS, Bantuan Benih	4	750.000.000

	Daerah Kabupaten/Kota	Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Ikan Starter (18.000 kg) Perdin Verifikasi dan identifikasi							
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan		100		1.122.000.000			100	1.380.000.000
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil									
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan (%)	Pertemuan koordinasi, kampanye dan himbauan, pemantauan dan pengawasan	100	Provinsi Lampung	162.000.000	APBD / DAK		100	80.000.000
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Tersedianya Operasional Kapal Pengawasan mendukung patroli laut (unit)	Operasional patroli laut, pemeliharaan dan perbaikan kapal pengawasan	2 unit	Perairan 0-12 mil, Provinsi Lampung	550.000.000	APBD	Pemeliharaan Seare ader	2 unit	800.000.000

3.25.05.1. 01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 MIL	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	Pemantauan dan pengawasan pelaku usaha budidaya laut	60 unit	Provinsi Lampung	50.000.000	APBD		60 unit	75.000.000
3.25.05.1. 01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang dibina (pokmaswas)	Pembinaan Pokmaswas, Forum koordinasi, Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	21 pokmaswas	14 Kab/Kota	200.000.000	APBD / DAK		21 pokmaswas	200.000.000
3.25.05.1. 02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
3.25.05.1. 02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Kab/kota yang di pantau/ diawasi (kab/kota)	Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap, kampanye dan himbauan	7 kab/kota	7 kab/kota	50.000.000	APBD		7 kab/kota	75.000.000

3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Kab/kota yang di pantau/ diawasi (kab/kota)	Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, kampanye dan himbuan	7 kab/kota	7 kab/kota	50.000.000	APBD		7 kab/kota	75.000.000
3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	Pemantauan dan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan, kampanye dan himbuan	60 unit	Provinsi Lampung	60.000.000	APBD		60 unit	75.000.000
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Ekspor Perikanan (kg)		21.845.742		2.375.000.000			21.845.742	1.875.000.000
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									

3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha budidaya ikan yang diterbitkan rekomendasin izinnya / dilakukan pembinaan (kelompok)	Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal kepada 6 UMKM	15	Bandar Lampung	50.000.000	APBD		10 dokumen	75.000.000
3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen potensi investasi/ promosi yang disusun (dokumen)	Pengolahan Data Potensi dan workshop Penghitungan Angka Konsumsi Ikan Peningkatan kompetensi fungsional APHP	2 dokumen	Bandar Lampung	150.000.000	APBD		2 dokumen	200.000.000
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi sesuai persyaratan/ meningkat kompetensinya (orang)	Pelatihan Pengolahan menggunakan Mobil Alih teknologi (4 lokasi) Pelatihan Pembina Mutu (GMP SSOP)	30 orang	Bandar Lampung	250.000.000	APBD		30 orang	150.000.000

			(1 kali) Pertemuan Validasi Statistik Pengolahan (1 kali)							
3.25.06.1. 02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah produk, TPI, pasar, kualitas air, pakan ikan, residu antibiotik yang terpantau	Pembelian reagen dan media pengujian, Pemeliharaan Alat Laboratorium, Pembelian Alat Uji Lemak	330 sampel	UPTD LPPHP, Provinsi Lampung	950.000.000	APBD	Penambahan bahan belanj a alat	350 sampel	450.000.000
3.25.06.1. 03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
3.25.06.1. 03.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemantauan yang dilaksanakan	Survailen dan Pembinaan UMKM, Pemeliharaan Akreditasi KAN sebagai lembaga pengujian dan Sertifikasi	15 Kegiatan	UPTD LPPHP, Provinsi Lampung	250.000.000	APBD	Penambahan bahan Pagu	15	250.000.000

			Produk							
3.25.06.1. 03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah bantuan sarana, prasarana dan paket makanan yang diberikan (paket)	Lomba masak tingkat provinsi bersama PKK Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (150 org x 15 kab/kota) Peringatan Harkannas	510	Provinsi Lampung	725.000.000	APBD		610 paket	750.000.000
					TOTAL	43.881.047.684				35.843.999.484

BAB V.

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung guna mendukung pembangunan daerah khususnya dibidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Rencana Kerja Tahun 2023 telah memprogramkan kegiatan-kegiatan prioritas untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama khususnya dalam peningkatan produksi dan konsumsi ikan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan masukan saat penyusunan program kerja dan anggaran tahunan di Provinsi Lampung, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Ir. LIZA DERNI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19680812 199903 2 003

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI LAMPUNG**

PD: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan									
3:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		100%		20.669.261.484			100%	21.203.999.484
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan		100%		150.000.000				225.000.000
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Rencana aksi, Rencana Kinerja tahunan, Identifikasi resiko program/ kegiatan (SPIP)	Musrenbang Kelautan dan Perikanan	5 dokumen	Bandar Lampung	65.000.000	APBD		5 dokumen	75.000.000
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	Rakor Lingkup Kelautan dan Perikanan	3 Kegiatan	Provinsi Lampung	60.000.000	APBD		3 Kegiatan	75.000.000
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja (Laporan Kinerja, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, PK, dan LPPD/LKPJ)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	Provinsi Lampung	25.000.000	APBD		6 dokumen	75.000.000
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan		1 dokumen	1 dokumen	15.063.999.484			1 dokumen	15.143.999.484
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	Bandar Lampung	15.018.999.484	APBD	Penataan belanja	1 tahun	15.018.999.484
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	Bandar Lampung	25.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000
3.25.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran PD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 dokumen	Bandar Lampung	20.000.000	APBD		1 dokumen	75.000.000
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan BMN		1 dokumen	1 dokumen	30.000.000			1 dokumen	40.000.000
3.25.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Barang Milik Daerah pada SKPD		3 dokumen	Bandar Lampung	20.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000
3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 dokumen	Bandar Lampung	10.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (orang)		100%	100%	115.500.000			100%	120.000.000
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi (orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 orang	Bandar Lampung	45.000.000	APBD		6 orang	50.000.000
3.25.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan serta pembinaan budaya kerja (kali)	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	6 kali	Bandar Lampung	30.000.000	APBD		5 kali	30.000.000
3.25.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 kali	Bandar Lampung	40.500.000	APBD		4 kali	40.000.000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		100%		1.346.859.000			100%	2.650.000.000
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Waktu Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Bandar Lampung	25.000.000	APBD		1 Tahun	25.000.000
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Bandar Lampung	50.000.000	APBD		1 Tahun	40.000.000
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Bandar Lampung	10.000.000	APBD	Penataan belanja	1 Tahun	20.000.000
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah UPTD yang disediakan operasionalnya	Operasional UPTD dan LS Pro HP	1 UPTD	UPTD LPPHP, Bandar Lampung	176.399.000	APBD	Penataan belanja	1 UPTD	400.000.000
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Bandar Lampung	20.000.000	APBD		1 Tahun	20.000.000
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan publikasi dalam media cetak	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Bandar Lampung	25.000.000	APBD		1 Tahun	25.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah waktu pengadaan ATK, bahan kebersihan dan pameran yang disediakan	Penyediaan Bahan/ Material	1 Tahun	Bandar Lampung	80.000.000	APBD		1 Tahun	80.000.000
3.25.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Penyediaan Layanan Makan dan Minum	Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	Bandar Lampung	40.000.000	APBD		1 Tahun	40.000.000
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu penyediaan perjalanan dinas koordinasi, konsultasi, pembinaan dan movev lingkup OPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Provinsi Lampung dan Luar Provinsi	920.460.000	APBD	Penataan belanja	1 Tahun	2.000.000.000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 tahun		226.007.000			1 tahun	300.000.000
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin kantor (unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	Bandar Lampung	149.858.200	APBD		10 unit	150.000.000
3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	Bandar Lampung	76.148.800	APBD		10 unit	150.000.000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 tahun		2.861.374.000			1 tahun	2.075.000.000
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	Bandar Lampung	556.733.500	APBD	Penataan belanja	1 tahun	475.000.000
3.25.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Layanan perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	Bandar Lampung	50.000.000	APBD		1 tahun	50.000.000
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Layanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	Bandar Lampung	2.254.640.500	APBD	Penataan belanja	1 tahun	1.550.000.000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 tahun		875.522.000			1 tahun	650.000.000
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Pajak dan Perizinan, Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	Bandar Lampung	426.967.000	APBD	Penataan belanja	1 tahun	350.000.000
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Layanan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	Bandar Lampung	398.660.000	APBD		1 tahun	200.000.000
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Layanan Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	Bandar Lampung	49.895.000	APBD		1 tahun	100.000.000
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)		85		1.025.000.000			85	1.400.000.000
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		3 kegiatan					3 kegiatan	
3.25.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan aturan pelaksanaannya yang diterbitkan (dokumen)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Koordinasi integrasi RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Lampung.	2 dokumen	Bandar Lampung, Pesisir Barat	200.000.000	APBD		2 dokumen	300.000.000
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa, Pembinaan Kawasan Konservasi Daerah Sosialisasi Penanganan Mamalia Terdampar Pemasangan Papan himbauan dan bantuan honorarium pengelola KKLD	231.467	Pesisir Barat dan Tanggamus	313.000.000	APBD / DAK Konservasi		231.467	100.000.000
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau dan/atau kawasan konservasi yang direhabilitasi	DAK (Pembangunan Gedung Kantor dan Gapura KKLD Ngambur)	2 lokasi	Pesisir Provinsi Lampung	22.000.000	APBD		1 lokasi	300.000.000
3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilakukan	Pendataan Tutupan terumbu karang di Perairan Provinsi Lampung	2 kegiatan		215.000.000	APBD		2 kegiatan	200.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		1 kegiatan					1 kegiatan	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (dokumen)	Verifikasi Lapangan KKPRL Pendataan Kegiatan Eksisting Pemanfaatan Ruang Laut	10	Bandar Lampung	75.000.000	APBD	Penataan belanja	10	100.000.000
3.25.02.1.03	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		2 kegiatan					2 kegiatan	
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik (lokasi)	Kegiatan Bulan Cinta Laut Operasional Kapal Teluk Lampung	4 lokasi	PPP Lempasing, Bandar Lampung dan Tulang Bawang	180.000.000	APBD		4 lokasi	200.000.000
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan	DAK (Pengembangan Usaha Garam)	5 kali	7 Kab/Kota Pesisir Provinsi Lampung	20.000.000	APBD / DAK GARAM		5 kali	200.000.000
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)		193.509,84		15.056.928.200			193.509,84	5.560.000.000
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana nelayan yang disediakan	Bantuan alat tangkap ramah lingkungan (bubu 900 unit dan jaring gillnet 200 piece), Perdin identifikasi dan penyerahan bantuan.	100 unit	100 unit	400.000.000	APBD	Sarpras Alat Tangkap	100 unit	750.000.000
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan/ kelompok yang meningkatkan kompetensinya/ mendapat asuransi (orang)	Bantuan Jaminan Sosial bagi Nelayan Kecil (1.150 nelayan), Perdin sosialisasi dan verifikasi.	1150 orang		350.000.000	APBD	Asuransi Nelayan	1500 orang	400.000.000
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan mendukung Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan								
3.25.03.1.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data SDI yang tersedia (dokumen).	Kegiatan validasi dan pendampingan statistik perikanan tangkap.	1 dokumen	14 Kab/Kota	100.000.000	APBD		1 dokumen	400.000.000
3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha penangkapan / benih SDI yang disediakan	Restocking Perairan Umum Daratan (100.000 ekor Jelabat, 120.000 ekor Patin, 400.000 ekor Nila), Kegiatan identifikasi dan Penebaran di 4 lokasi.	1.050.000 ekor	14 Kab/Kota	400.000.000	APBD	Restocking	1500 orang	400.000.000
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kegiatan mendukung Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT		2 kegiatan					2 kegiatan	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah nelayan yang dibina/dilayani dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap (lokasi)	Pelaksanaan Gerai Perizinan di 2 lokasi (1 kali)	1000 Nelayan	Provinsi Lampung	115.948.200	APBD	Penataan belanja	1000 Nelayan	30.000.000
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		4 pelabuhan					4 pelabuhan	
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan dan TPI yang dibina (Pelabuhan)	Perdin Pembinaan (146 jt)	9 pelabuhan	7 Kab/Kota Pesisir Provinsi Lampung	150.000.000	APBD		9 pelabuhan	100.000.000
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan yang ditata/ dibangun sarananya (pelabuhan)	DAK	2 lokasi	PPP Lempasing, Bandar Lampung dan PPP Kota Agung, Tanggamus	12.062.000.000	DAK		2 lokasi	1.000.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I yang dikelola (UPTD)	Operasional Pelabuhan,	1 PPP	PPP Lempasing, Bandar Lampung	1.428.980.000	APBD	Penataan belanja	1 PPP	2.400.000.000
		Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II yang dikelola (UPTD)	Pelayanan Pelabuhan di PP Labuhan Maringgai, PP Teladas dan PP Kuala Penet	2 PPP	PPP Labuhan Maringgai, Lampung Timur dan PPP Teladas, Tulang Bawang				2 PPP	
		Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III yang dikelola (UPTD)	Operasional Pelabuhan, Pengadaan meubeleur gedung syahbandar.	1 PPP	PPP Kota Agung, Tanggamus				1 PPP	
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT									
3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pendataan dan pendaftaran	100 Nelayan	Provinsi Lampung	50.000.000	APBD		120 Nelayan	80.000.000
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		205.040,53		3.632.858.000			205.040,53	4.425.000.000
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			10 dokumen						
3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah pelaku usaha budidaya ikan yang diterbitkan rekomendasin izinnya / dilakukan pembinaan (kelompok)	Sosialisasi KPB	30	Provinsi Lampung	150.000.000	APBD		30	75.000.000
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut									
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut/Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan (dokumen)	Validasi data statistik perikanan budidaya	1	Provinsi Lampung	320.000.000	APBD	Penataan belanja	1	200.000.000
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan (paket)	Bantuan KJA Lobster (4 unit)	4	Pesawaran dan Lampung Selatan	120.000.000	APBD	Penataan belanja	4	750.000.000
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan (paket)	Operasional BPBALP di Kota Agung dan Lanjutan pembangunan	3	Kota Agung	842.164.000	APBD	BBALP	3	2.000.000.000
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan (unit)	Bantuan Pakan Ikan kerjasama Unila (23.000 kg) Bantuan Budikdamber (530 paket)	1	Provinsi Lampung	450.000.000	APBD	Bantuan Budidaya	1	1.000.000.000
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan (kegiatan)	Sosialisasi Obat Ikan dan Pakan (5 lokasi) Pelatihan Budidaya (1 kali)	15	Provinsi Lampung	200.000.000	APBD		15	100.000.000
3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya (pembudidaya)	Perdin monitoring, pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan (CBIB)	30	Bandar Lampung	80.000.000	APBD		30	100.000.000
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat									
3.25.04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Calon Induk/Pakan Alami/Tandon (DAK)	1	BBIS Purbolinggo, Lampung Timur, Provinsi Lampung	700.000.000	DAK		1	800.000.000
3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Operasional BBIS Purbolinggo, Pakan Induk dan Benih Penyediaan sarpras (Bak Fiber) Bantuan Benih dan Pakan Ikan Starter (18.000 kg) Perdin Verifikasi dan identifikasi	4	BBIS Purbolinggo, Lampung Timur, Provinsi Lampung	770.694.000	APBD	Opr. BBIS, Bantuan Benih	4	750.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan		100		1.122.000.000			100	1.380.000.000
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil									
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan (%)	Pertemuan koordinasi, kampanye dan himbauan, pemantauan dan pengawasan	100	Provinsi Lampung	162.000.000	APBD / DAK		100	80.000.000
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Tersedianya Operasional Kapal Pengawasan mendukung patroli laut (unit)	Operasional patroli laut, pemeliharaan dan perbaikan kapal pengawasan	2 unit	Perairan 0-12 mil, Provinsi Lampung	550.000.000	APBD	Pemeliharaan Seareader	2 unit	800.000.000
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 MIL	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	Pemantauan dan pengawasan pelaku usaha budidaya laut	60 unit	Provinsi Lampung	50.000.000	APBD		60 unit	75.000.000
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang dibina (pokmaswas)	Pembinaan Pokmaswas, Forum koordinasi, Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	21 pokmaswas	14 Kab/Kota	200.000.000	APBD / DAK		21 pokmaswas	200.000.000
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Kab/kota yang di pantau/ diawasi (kab/kota)	Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap, kampanye dan himbauan	7 kab/kota	7 kab/kota	50.000.000	APBD		7 kab/kota	75.000.000
3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Kab/kota yang di pantau/ diawasi (kab/kota)	Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, kampanye dan himbauan	7 kab/kota	7 kab/kota	50.000.000	APBD		7 kab/kota	75.000.000
3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	Pemantauan dan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan, kampanye dan himbauan	60 unit	Provinsi Lampung	60.000.000	APBD		60 unit	75.000.000
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Ekspor Perikanan (kg)		21.845.742		2.375.000.000			21.845.742	1.875.000.000
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha budidaya ikan yang diterbitkan rekomendasi izinnya / dilakukan pembinaan (kelompok)	Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal kepada 6 UMKM	15	Bandar Lampung	50.000.000	APBD		10 dokumen	75.000.000
3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen potensi investasi/ promosi yang disusun (dokumen)	Pengolahan Data Potensi dan workshop Penghitungan Angka Konsumsi Ikan Peningkatan kompetensi fungsional APHP	2 dokumen	Bandar Lampung	150.000.000	APBD		2 dokumen	200.000.000
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi sesuai persyaratan/ meningkat kompetensinya (orang)	Pelatihan Pengolahan menggunakan Mobil Alih teknologi (4 lokasi) Pelatihan Pembina Mutu (GMP SSOP) (1 kali) Pertemuan Validasi Statistik Pengolahan (1 kali)	30 orang	Bandar Lampung	250.000.000	APBD		30 orang	150.000.000
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah produk, TPI, pasar, kualitas air, pakan ikan, residu antibiotik yang terpantau	Pembelian reagen dan media pengujian, Pemeliharaan Alat Laboratorium, Pembelian Alat Uji Lemak	330 sampel	UPTD LPPHP, Provinsi Lampung	950.000.000	APBD	Penambahan belanja alat	350 sampel	450.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
3.25.06.1.03.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemantauan yang dilaksanakan	Survailen dan Pembinaan UMKM, Pemeliharaan Akreditasi KAN sebagai lembaga pengujian dan Sertifikasi Produk	15 Kegiatan	UPTD LPPHP, Provinsi Lampung	250.000.000	APBD	Penambahan Pag	15	250.000.000
3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah bantuan sarana, prasarana dan paket makanan yang diberikan (paket)	Lomba masak tingkat provinsi bersama PKK Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (150 org x 15 kab/kota) Peringatan Harkannas	510 paket	Provinsi Lampung	725.000.000	APBD		610 paket	750.000.000
					TOTAL	43.881.047.684				35.843.999.484

Bandar Lampung, Juni 2022
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung



Ir. Liza Derni, M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 19680812 199903 2 003